

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis pada penelitian kali ini diantaranya :

1. **Indra Permana Putra (2013)**

Penelitian pertama yang dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian yang berjudul “Analisis tingkat efisiensi perbankan BUMN dan Bank Asing di Indonesia”.

Rumusan masalah pada penelitian tersebut apakah DEA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi bank BUMN dan Bank Asing di Indonesia.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bank yang telah beroperasi di Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2011. Metode penelitian data menggunakan metode dokumentasi berupa laporan keuangan pada masing – masing bank sampel pada tahun 2007 – 2011. Teknik pengambilan sample pada penelitian tersebut menggunakan *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah DEA.

Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan DEA, tingkat efisiensi pada kelompok bank asing lebih tinggi dari pada kelompok bank BUMN. Hal ini membuktikan

kesehatan kelompok perbankan asing lebih baik dari pada kesehatan kelompok perbankan BUMN dan bank asing diantaranya pada sisi input yakni biaya tenaga kerja dan pada sisi output yakni penempatan dana antar bank.

2. Penyebab lain yang melatarbelakangi rendahnya efisiensi variabel BUMN yaitu pertama, jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat oleh bank BUMN jauh lebih besar dari pada bank asing. Besarnya jumlah DPK ini mewajibkan bank untuk membayar beban bunga simpanan dari nasabah. Berbeda dengan bank asing, jumlah DPK lebih banyak berasal dari aliran dana dan investasi dari luar negeri. Kedua, kantor cabang dari bank BUMN hampir tersebar diseluruh Indonesia yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja ini menyebabkan efisiensi biaya tenaga kerja semakin membengkak. Berbeda dengan perbankan asing, keberadaan kantor perbankan asing hanya tersebar pada kota – kota besar yang ada di Indonesia. Ketiga, investasi yang dilakukan oleh bank BUMN jauh lebih berisiko dari pada bank asing. Bank BUMN umumnya menyalurkan dananya pada sektor kredit yang mempunyai resiko tertinggi dari pada investasi lainnya. Sedangkan perbankan asing lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk surat berharga dan penempatan dana antar bank. Diperburuk lagi dengan keadaan fluktuasi ekonomi yang tidak menentu menyebabkan para nasabah dan investor berpikir dua kali untuk menyalurkan dananya pada bank BUMN dikarenakan penjaminan dana oleh LPS hanya dibatasi hingga Rp. 2 Milliar, sedangkan bank asing menjamin penuh atau full Guaranteed dana yang diinvestasikan pada bank asing. Hal ini menyebabkan

efisiensi pada penempatan dana antar bank dan surat berharga lebih tinggi pada bank asing dari pada bank BUMN.

2. Putu Yesi Fransiska Dewi (2012)

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian yang berjudul “Pengaruh risiko kredit, DPK, Likuiditas, dan Tingkat efisiensi usaha pada volume kredit pada BPR Denpasar” yang ditulis oleh Putu Yesi Fransiska Dewi pada tahun 2012.

Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu apakah NPL, Dana Pihak ketiga, LDR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder digunakan berbentuk panel data dari 20 BPR selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 – 2012. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa laporan keuangan 20 BPR yang diperoleh dari Bank Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan sensus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi data panel menggunakan estimasi *Common Effect* dengan SPSS versi 16.

Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni menyajikan bagaimana risiko kredit, dana pihak ketiga, likuiditas dan tingkat efisiensi usaha mempengaruhi volume kredit pada BPR di Kota Denpasar. Uji hipotesis menemukan bahwa menurunnya risiko kredit dan bertambahnya dana pihak ketiga serta likuiditas secara signifikan menyebabkan bertambahnya volume kredit pada BPR di Kota Denpasar. Namun, meningkatnya tingkat efisiensi usaha belum tentu menyebabkan

bertambahnya volume kredit pada BPR di Kota Denpasar. Hal ini terjadi karena meskipun secara rata – rata rasio BOPO pada BPR efisiensi tetapi beragamnya data BPR menyebabkan variabel tingkat efisiensi usaha tidak signifikan.

3. Mumu Daman Huri dan Indah Susilowati (2002)

Penelitian ketiga yang dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian yang berjudul “ Pengukuran efisiensi relatif emiten perbankan dengan metode *Data Envelopment Analysis* pada bank – bank yang terdaftar di BEJ tahun 2002”

Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah apakah DEA berpengaruh secara signifikan terhadap pengukuran efisiensi relatif emiten perbankan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa emiten bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa bank- bank yang terdaftar di BEJ pada tahun 2002 memiliki tingkat efisiensi 100 persen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan DEA.

Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu perhitungan yang dilakukan dengan DEA menunjukkan bahwa terdapat enam bank yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100 persen, yaitu bank Buana Indonesia dengan nilai efisiensi 68,25 persen, Bank Dan Pac (49,76 persen) Bank Internasional Indonesia (73,70 persen), Bank Global Internasional (51,36 persen) serta Bank Permata (62,68 persen). Sedangkan duabelas bank lainnya mencapai nilai efisiensi maksimum yaitu mencapai 100 persen diantaranya Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Nusantara

Parahyangan, Bank Pan Indonesia, Bank Danamon Indonesia, Bank NISP, Bank Pikko, Bank Mayapada Internasional, Bank Inter- pasific.

Tabel 2.1

PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN – PENELITIAN TERDAHULU

No	Keterangan	Indra Permana P	Putu Yesi F. D	Mumu Daman Huri dan Indah S.	Peneliti Sekarang
1.	Variabel Bebas	Biaya bunga, Biaya tenaga kerja, biaya operasional lainnya	NPL, DPK, LDR, BOPO	Analisis DEA (CRS)	LDR dan NPL
2.	Variabel Terikat	DEA	Volume Kredit	Analisis DEA	DEA (Efisiensi)
3.	Subjek Penelitian	Bank BUMN dan Bank Asing	Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar	Bank – Bank yang terdaftar di BEJ	Bank swasta devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia
4.	Teknik Pengambilan Sampel	Purposive Sampling	Sensus	Purposive Sampling	Purposive Sampling
5.	Periode Penelitian	2007 – 2011	2008 – 2012	2002	2011 – 2014
6.	Data Penelitian	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
7.	Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
8.	Teknik Analisis Data	Analisis DEA	Analisis Regresi Data Panel	DEA	Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber : Indra Permana (2013), Putu Yesi (2012), Daman Huri *et all* (2002)

Berdasarkan tabel ringkasan penelitian terdahulu diatas, perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan 2 (dua) sekaligus variabel independen yang merupakan faktor utama dalam penilaian tingkat efisiensi bank yaitu, penyaluran kredit dan kredit bermasalah. Peneliti mengambil dua variabel independen tersebut dikarenakan, kredit merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki oleh industri bank. Sehingga bisa memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Sedangkan pada

penelitian terdahulu hanya menggunakan salah satu faktor, baik hanya menggunakan variabel penyaluran kredit atau hanya menggunakan variabel kredit bermasalah saja. Kemudian perbedaan lainnya pada penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini perbankan swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan bank swasta devisa sebagai obyek penelitian dikarenakan bank swasta devisa sendiri merupakan bank yang paling banyak yang ada di Indonesia. Selain itu bank swasta devisa merupakan bank yang mempunyai aset menengah ke bawah dan merupakan bank yang tergantung pada output kredit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian tentang Bank

Dalam era pembangunan, perbankan memegang peranan penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan serta sebagai lembaga keuangan. Bank sangat dibutuhkan masyarakat karena semua pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter dari pemerintah. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Pokok- Pokok Perbankan yang menjelaskan bahwa Bank merupakan “suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Definisi bank menurut **Rivai (2013: 1)** adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh

keuntungan bagi pemilik. Dari pengertian bank diatas, maka dapat dirumuskan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih serta menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Adapun tugas dari perbankan sesuai dengan Undang- Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 , antara lain :

1. Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan moneter
 - a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
 - b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara- cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
 - Penetapan tingkat diskonto
 - Penetapan cadangan wajib minimum
 - Pengantrian kredit dan pembiayaan
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran :
 - a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran.
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan.
 - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
 - d. Mengatur dan mengawasi bank.

2.2.2 Jenis - jenis Bank

Dengan mendasarkan pada fungsi dan peranannya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun

1998 Tentang Pokok- Pokok Perbankan, bank di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis bank, antara lain :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

2.2.2.1 Bank Umum

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok- Pokok Perbankan, peran atau fungsi dasar bank umum sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memberikan jasa atau layanan kepada pihak yang berkepentingan (penabung dan debitur) dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi- transaksi. Lebih jauh dan terperinci, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, seperti :

- a. Penghimpun dana dari masyarakat
- b. Pemberian Kredit
- c. Penerbitan surat pengakuan hutang
- d. Kegiatan jual- beli dan penjaminan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, termasuk :
 1. Surat- surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank
 2. Surat pengakuan hutang
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun
- e. Pemindahan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk nasabah
 - f. Penempatan dana pada peminjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke tiga
 - h. Penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
 - k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
 - l. Kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
 - m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.1.1 Jenis- Jenis Bank Umum Berdasarkan Pada Kepemilikannya

Jenis- jenis bank umum yang ada di Indonesia, dengan mendasar pada kepemilikan terhadap bank, maka dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 menjelaskan bahwa bank umum dapat dibedakan menjadi 4 kelompok bank, yaitu :

1. Bank Umum Milik Negara, yaitu Bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang- Undang
2. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bank umum swasta sendiri mempunyai dua macam yakni bank swasta devisa dan bank swasta non devisa.
3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama- sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau oleh badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri.
4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.2.2.1.2 Jenis Bank Umum Berdasarkan Prinsip Dasar Operasional

a. Bank Umum Konvensional

Bank umum konvensional adalah bank yang prinsip dasar operasionalnya berdasarkan atau mengacu pada prinsip tujuan ekonomi yaitu menyalurkan kredit, baik dengan alat- alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, ataupun dengan uang yang diperoleh dari orang lain, ataupun dengan mengedarkan alat- alat penukar baru berupa uang giral. Selain itu, bank umum konvensional juga merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan

fungsinya untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Pada dasarnya fungsi- fungsi bank umum konvensional adalah sebagai berikut :

1. Perantara antara anggota masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan anggota masyarakat yang membutuhkan dana bagi kepentingannya.
2. Lembaga kepercayaan yang berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana yang tersimpan di bank.
3. Lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan laba untuk mempertahankan usahanya.
4. Lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar keuangan dan ikut mendorong laju sektor ekonomi.

b. Bank Umum Syariah

Ketentuan tentang Bank Umum Syariah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan berupa Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan tanggal 12 Mei 1999. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pengertian Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip- prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

2.2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Usaha yang dilakukan BPR untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Adapun usaha – usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami kelebihan likuiditas.

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR :

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

2.2.3 Kredit

2.2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata latin *credo* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, kredit memiliki arti khusus yakni seseorang yang memberikan kepercayaan kepada orang yang meminjam uang dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama dengan masa waktu pengembalian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998 kredit adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Menurut **Rivai (2006;3)** menjelaskan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau penguutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.2.3.2 Unsur- Unsur Kredit

Kredit diberikan oleh pemberi kredit (kreditor) kepada penerima kredit (nasabah) atas dasar kepercayaan, sehingga kepercayaan yang diberikan benar- benar diyakini dan mampu dikembalikan oleh kreditur sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang dilakukan bersama.

Menurut **Rivai (2006;5-6)** unsur- unsur dalam pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya *kepercayaan* pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsuressensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari

pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

2.2.3.3 Tujuan Kredit

Misi dari bank dalam memberikan kredit yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut **Rivai (2006; 6-7)** terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha- usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar- benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar- benar

tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul- betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.2.4 Rasio Keuangan pada Bank

2.2.4.1 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas kesehatan bank. Selain itu Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan dari jumlah modal sendiri ditambah dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Bagi bank yang dapat menjaga likuiditasnya, kemungkinan bank tersebut terhindar dari masalah sehingga bank tersebut akan mendapatkan keuntungan (profitabilitas) yang optimal.

Menurut **Rivai (2006; 281)** menjelaskan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri. Oleh karena itu, manajemen bank perlu memelihara LDR yang dapat meningkatkan kesehatan bank.

Sesuai dengan (SE BI Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010) rumus *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{jumlah kredit yang diberikan}}{\text{jumlah deposit}} \times 100\%$$

Batas aman LDR secara umum adalah sebesar 81% - 100%. Sedangkan menurut ketentuan Bank Sentral, batas aman LDR suatu bank adalah 110%.

2.2.4.2 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Pengertian Kredit bermasalah yaitu keadaan dimana nasabah sudah tidak dapat membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Menurut (SE BI Nomor 12/ 11 / DPNP Tanggal 31 Maret 2010) rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio NPL berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 antara lain :

TABEL 2.2

KRITERIA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN RASIO NPL

RASIO	PREDIKAT
$NPL \leq 5\%$	SEHAT
$NPL > 5\%$	TIDAK SEHAT

Sumber Data : Surat Edaran Bank Indonesia

Bank Indonesia menetapkan Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (Non Performing Loan) adalah sebesar 5%, apabila suatu bank melebihi kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio, maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

2.2.5 Efisiensi Bank

2.2.5.1 Pengertian Efisiensi

Pengukuran kinerja efisiensi perbankan berguna untuk dasar perhitungan kesehatan dan pertumbuhan perbankan. Suseno (2008:31), menyatakan bahwa efisiensi merupakan akar permasalahan kesehatan dan sumber pertumbuhan perbankan. Efisiensi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian agar perbankan dapat berdaya saing, berkembang, dan mampu berperan secara lebih optimal bagi pembangunan nasional. Sebagai entitas bisnis, perbankan dituntut untuk senantiasa bekerja secara efisien.

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Suatu perusahaan dikatakan efisien jika dapat menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menggunakan input yang sama. Selain itu juga mampu menghasilkan *output* yang sama, tetapi *input* yang dipergunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah *input* yang digunakan perusahaan lain. Dengan demikian, ada tiga indikator untuk mengukur tingkat efisiensi, yaitu apabila dengan :

1. *Input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar
2. *Input* yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama
3. *Input* yang lebih besar dapat menghasilkan jumlah *output* dengan prosentase yang lebih besar.

Konsep pengukuran efisiensi perbankan pertama kali ditemukan oleh Farrell (1957). Secara teknik, ada tiga konsep efisiensi, yaitu efisiensi biaya (*cost efficiency*), efisiensi keuntungan standar (*standart profit efficiency*), dan efisiensi keuntungan alternative (*alternative profit – efficiency*). Efisiensi biaya mengukur

seberapa dekat perbedaan antara biaya nyata dengan berbagai kemungkinan tingkat biaya yang terjadi untuk menghasilkan jumlah *output* yang sama. Efisiensi keuntungan standar mengukur seberapa dekat keuntungan nyata dengan tingkat keuntungan maksimum yang dapat dicapai pada tingkat harga *input* dan *output* tertentu. Sedangkan efisiensi keuntungan alternative mengukur seberapa dekat keuntungan yang diperoleh bank dengan tingkat keuntungan maksimum yang mungkin dapat dicapai pada berbagai level kuantitas *output* dan harga *input* (Berger dan Mester, 1997).

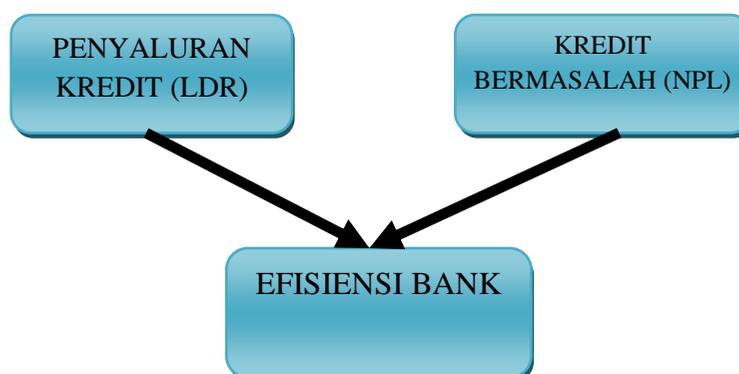
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengukuran Efisiensi Biaya. Efisiensi biaya dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi *output* dan efisiensi *input*. Efisiensi *output* didasarkan kepada perbandingan antara biaya disemua level *output* dengan biaya optimumnya. Inti dari efisiensi ini adalah seberapa banyak *output* yang dapat ditingkatkan secara profesional tanpa merubah jumlah *input*. Sedangkan efisiensi *input* adalah terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan *input* secara efisien dalam menghasilkan *output* yang lebih banyak. Atau dengan kata lain, seberapa banyak *input* yang dapat dikurangi tanpa merubah jumlah *output* yang dapat dihasilkan. Pada prinsipnya ada dua teknik atau pendekatan dalam mengukur tingkat efisiensi perbankan yaitu :

1. Menggunakan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan BOPO.
2. *Operation Research (OR)* seperti *Data Envelopment Analysis (DEA)*, *Stochastic Frontier Approach (SFA)*, *Distribussion Free Approach (DFA)*, *Recursive Thick Frontier Approach (RTFA)*, dan *Possible Free Hull (PFH)*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan DEA untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan. DEA sendiri memiliki arti teknik pemrograman linier untuk menilai kinerja unit pembuat keputusan (*decision making unit-DMU*) atau suatu bank dalam suatu industry beroperasi dalam hubungannya dengan bank lain dalam sampel. Teknik ini membuat kumpulan batas (*frontier set*) perbankan yang efisien dan membandingkannya dengan perbankan lain yang tidak efisien. Ini dilakukan untuk membuat penilaian efisiensi, nilai efisiensi dibatasi antara 0 dan 1. Bank yang paling efisien mempunyai skor 1, dan bank yang tidak efisien skornya 0. Dalam pendekatan DEA, bank yang paling efisien dengan nilai 1 tidak perlu menghasilkan tingkat *output* maksimum daripada *input* yang ada. Bank tersebut cukup menghasilkan “*Best Practice Level of Output*” diantara bank lain dalam sampel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran dibawah ini menjelaskan apakah penyaluran kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada perbankan. Selain penyaluran kredit, apakah kredit bermasalah juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi perbankan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Bank di dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit harus melakukan suatu prinsip kebijakan dalam memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dimana digunakan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Kebijakan pemberian kredit tersebut mencakup tahap analisis kredit hingga saat pelunasan. Dengan melakukan kebijakan tersebut, manajemen suatu bank dapat menjaga aset dari bank tersebut serta menghindarkan dari kejadian- kejadian yang membuat manajemen bank tersebut mengalami kerugian. Penelitian terhadap penyaluran kredit serta kredit bermasalah diperlukan untuk mengukur apakah kedua faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efisiensi bank dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan. Karena jika bank tersebut tidak melakukan secara efektif dan efisien, maka bank yang bersangkutan akan mengalami berbagai masalah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis yang ditunjukkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran Kredit dan Kredit Bermasalah secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi pada bank swasta devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia.
2. Penyaluran Kredit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi bank swasta devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia.
3. Kredit Bermasalah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efisiensi bank swasta devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia.